

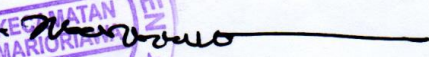
KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2017 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Batu-Batu,

Camat Marioriawa

ABDUL CHAIR, AP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	11
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	13
3.2. Program dan Kegiatan Prioritas SKPD	13
BAB IV PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kec. Marioriawa Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kec. Marioriawa tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Kec. Marioriawa disebut Renja Kec. Marioriawa Tahun 2017 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2016 dan Renstra Kec. Marioriawa tahun 2016-2021 Nomor., untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Kec. Marioriawa. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kec. Marioriawa Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat Di Kabupaten Soppeng.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
33. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kec. Marioriawa tahun 2017 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kec. Marioriawa pada tahun 2017.

Renja Kec. Marioriawa Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kec. Marioriawa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2017
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kec. Marioriawa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kec. Marioriawa untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2017

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kec. Marioriawa Tahun 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. MARIORIAWA TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec.Marioriawa Tahun 2015 dan Capaian Renstra

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RenjaKec.Marioriawa Tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2015. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RenstraKec.Marioriawa dan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkanrealisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahunsebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kec.Marioriawa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kec.Marioriawa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec.Marioriawa

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kec.Marioriawa Tahun 2016.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kec. Marioriawa

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kec. Marioriawa Tahun 2015 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA KEC.MARIORIWA TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec.Marioriawa Tahun 2015 dan Capaian Renstra

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 28/Per-Bup/IX/2008 Tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kec.Marioriawa, Kec.Marioriawa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang perencanaan Kec.Marioriawa. Pelaksanaan program dan kegiatan Kec.Marioriawa Tahun 2015 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015.

Pada tahun 2014Kec.Marioriawa Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. AdapunRealisasi tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 yang dibayarkan pada PNS lingkup Kec.Marioriawa yang dianggarkan sebesar Rp.2.958.951.112,- dan terealisasi sebesar Rp.2.834.579.618,- atau 95,80%

b. Belanja Langsung

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.44.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.245.983723,- atau 72,85%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran listrik, telepon dan air selama 12 bulan.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dianggarkan sebesar Rp.3.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.909.720,- atau 75,57%. Kegiatan ini untuk perpanjangan izin kendaraan dinas operasional berupa 2STNK kendaraan roda empat dan 15 STNK kendaraan roda dua.
- Penyediaan layanan kebersihan kantor, yang dianggarkan sebesar Rp.7.054.000,- dengan realisasi Rp.7.054.000,- atau 100 %, kegiatan ini
-

berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa cleaning service untuk 12 bulan

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, yang dianggarkan sebesar Rp. 4.833.000,- dengan realisasi Rp. 4.833.000,- atau 100 %, kegiatan ini berupa alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun anggaran
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp.19.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.16.715.000,- atau 85,71% kegiatan ini berupa langganan bulanan surat kabar dan majalah selama satu tahun anggaran.
- Penyediaan bahan logistik kantor yang dianggarkan sebesar Rp.7.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.200.000,- atau sebesar 100% kegiatan ini berupa belanja tabung gas untuk satu tahun anggaran.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 125.018.200,- dan terealisasi sebesar Rp.116.693.000,- atau 93,34%, kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama satu tahun anggaran.
- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, yang dianggarkan sebesar Rp.201.295.086,- dengan realisasi Rp.199.855.452,- atau 99,28%, kegiatan ini berupa honorarium jasa administrasi keuangan dan pejabat/pemeriksa barang dan jasa, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos lainnya, penggandaan, jilid, makan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu untuk satu tahun anggaran.

b) Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan peralatan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 136.993.000,- dengan realisasi Rp. 135.325.000,- atau 98,78 % kegiatan ini berupa 3 unit komputer / PC, 2 unit komputer note book, 6 buah printer, 1 buah AC, 2 buah Filling kabinet, 4 buah kipas angin, 1 buah dispenser untuk satu tahun anggaran.
- Pengadaan mebeleur yang dianggarkan sebesar Rp. 24.550.000,- dengan realisasi Rp. 24.550.000,- atau 100 % kegiatan ini berupa 120 buah kursi plastik, 3 buah lemari, untuk satu tahun anggaran.

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.27.775.000,- dengan realisasi Rp.27.720.000,- atau 99,80% kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung, halaman dan taman selama 1 tahun anggaran.
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dianggarkan sebesar Rp.145.135.000,- dengan realisasi Rp.139.542.700,- atau 96,14% kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin dan belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional yaitu kendaraan roda empat dua unit dan kendaraan roda dua 15 unit selama 1 tahun anggaran.
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.6.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.900.000 atau 100 %, kegiatan ini berupa pemeliharaan 1 buah wereles, 14 unit komputer/PC dan laptop, 2 unit AC, 2 buah kompor gas, 1 unit mesin tik, untuk satu tahun anggaran.
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dianggarkan sebesar Rp. 32.175.000,- dengan realisasi sebesar Rp.31.380.000,- atau 97,52%, kegiatan ini berupa 66 pasang PDH dan 21 pasang pakaian olahraga.
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- Penyuluhan kamtibmas yang dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100 %
- e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,- dengan realisasi Rp. 4.450.000,- atau 49,45%, kegiatan ini meliputi perjalanan dinas luar daerah dan kursus-kursus singkat / pelatihan.
- f) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana ADD di Desa
- Fasilitasi pendampingan pengelolaan dan ADD di Desa yang dianggarkan sebesar Rp. 19.700.000,- dengan realisasi Rp. 18.713.608,- atau 94,99 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kec.Marioriawa

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk

penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec.Marioriawa

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kec.Marioriawa tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kec.Marioriawa` Kab. Soppeng.

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Perencana di Tingkat SKPD

Masalah lain yang mempengaruhi yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik, tepat waktu, dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

c. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kec. Marioriawa Kab. Soppeng. Keberadaan sumber daya Kec. Marioriawa Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kec. Marioriawa Kab. Soppeng :

a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia Kec. Marioriawa

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-program dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

c. Potensi SDM perencana yang tersedia tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin meningkat.

Melihat perkembangan saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa proses perencanaan semakin diperkuat dalam hal pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu dibutuhkan lembaga perencanaan yang ditunjang oleh perangkat perncanaan yang kuat pula dalam menghadapi tuntutan pembangunan dengan beban yang samakin meningkat. Sementara itu di Kec. Marioriawa masih sangat kurang aparat perencana yang kompeten.

d. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masih Butuh Penataan.

Kondisi organisasi Kec. Marioriawa dilihat dari struktur masih butuh penataan seperti belum masuknya tenaga fungsional di dalam struktur organisasi Kec. Marioriawa. Dengan ketiadaan tenaga fungsional dalam struktur organisasi menyebabkan penempatan tenaga fungsional seperti fungsional perencana, peneliti dan widyaswara belum dilaksanakan. Selain itu, pedoman kerja belum tersedia sehingga kecenderungan terjadi improvisasi dalam mengimplmentasikan program/kerja selama ini.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi penyelenggarapemerintahan umum dan optimalisasi pelayanan di tingkat Kecamatan, Kantor Camat Marioriawa menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan yang masih kurang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan
2. Masih rendahnya pelayanan berbasis TI.
3. Kapasitas sumberdaya manusia yang belum maksimal.

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar seksidan sub bagian maupun eksternal dengan SKPD lain. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Ke depan diharapkan Kantor Camat Marioriawa Kabupaten Soppeng mampu memberikan pelayanan yang prima kepadamasyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2016 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini

terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2015. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kec. Marioriawa Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kec. Marioriawa Tahun 2011 – 2015 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

2.5 Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Kec. Marioriawa Kab Soppeng mengacu pada Renstra Kec. Marioriawa Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2016. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Kec. Marioriawa Kab. Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada renja Kec. Marioriawa Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Lampiran

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

SKPD : KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2017 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN ketiga yang penetapannya masih menunggu Presiden terpilih dan merupakan transisi dari RPJMN kedua khususnya RKP 2014. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuang dalam RKP 2015 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2016.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Tema RKP tahun 2016 adalah **“Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”**.

Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2016 adalah **"Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Kawasan Strategis Tahun 2016 "**.

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi maka Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Soppeng secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam rencana kerja (renja) Kec. Marioriawa Soppeng Tahun 2016. Program kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen perencanaan, data-data dan informasi, serta mengkoordinasikan stakeholders yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Soppeng yang tertuang dalam visi-misi Kepala Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja KEC. MARIORIAWA

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng maka Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng akan turut aktif dalam hal perencanaan pembangunan. Berdasarkan pada Renja Kec. Marioriawa maka tujuan dari renja Kec. Marioriawa pada tahun 2017 yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparat.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM.

3. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi.
4. Mewujudkan pelayanan prima.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM aparat.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja aparat.
3. Tersedianya data dan informasi yang akurat.
4. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan,

Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin SKPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2017 yang dituangkan dalam renja 2017 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan



Kegiatan:

- a. Bupati menyapa
- b. Penyuluhan kantibmas

3. Program peningkatan Kapasitas kelembagaan dan masyarakat Desa/kelurahan
Kegiatan :
 - a. Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa
 - c. Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan
 - d. Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
 - e. Fasilitasi Kader Posyandu
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pengadaan Mebeleur
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5. Program Peningkatan Profesionalisme aparatur Aparatur
Kegiatan:
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Bimbingan tekhnis peraturan perundang-undangan
6. Program Pelayanan Perkantoran
Kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c. Penyediaan layanan kebersihan kantor
 - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .
 - f. Penyediaan bahanlogistik kantor
 - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
 - h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan:
 - a. Penyusunan profil Kelurahan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.. Renja Kec.Marioriawa Kabupaten Soppeng selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kec.Marioriawa. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kec.Marioriawa kabupaten Soppeng. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kec.Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Camat Marioriawa


ABDUL CHAIR, AP

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	01	Program Pelayanan Perkantoran		100%	264.263.800,00	100%	262.089.800,00	
	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ktr. Camat Marioriawa	12 bulan	66.600.000,00	12 bulan	66.600.000,00
	01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Ktr. Camat Marioriawa	3 unit	2.225.000,00	3 unit	2.225.000,00
	01 08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan luas area kantor yang dibersihkan	Ktr. Camat Marioriawa	190 M2	6.857.000,00	190 M2	6.857.000,00
	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Ktr. Camat Marioriawa	8 jenis	1.004.000,00	8 jenis	1.500.000,00
	01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ktr. Camat Marioriawa	1 tahun	5.000.000,00	1 tahun	4.500.000,00
	01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Ktr. Camat Marioriawa	1 tahun	2.210.000,00	1 tahun	2.040.000,00
	01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Ktr. Camat Marioriawa	1 tahun	63.228.800,00	1 tahun	61.228.800,00
	01 20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket pelayanan perkantoran	Ktr. Camat Marioriawa	8 seksi	117.139.000,00	8 seksi	117.139.000,00
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	178.371.400,00	100%	112.780.000,00
	02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		-	0,00	4 unit	415.000.000,00
	02 05	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Ktr. Camat Marioriawa	13 jenis	102.950.000,00	13 jenis	25.000.000,00
	02 07	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	Ktr. Camat Marioriawa	-	0,00	1 jenis	11.100.000,00
	02 09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang dipelihara	Ktr. Camat Marioriawa	1 tahun	1.955.000,00	1 tahun	3.500.000,00

		02	10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Ktr. Camat Marioriawa	7 unit	68.186.400,00	7 unit	68.180.000,00
		02	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Ktr. Camat Marioriawa	3 jenis	5.280.000,00	3 jenis	5.000.000,00
		02	24	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik		100%	10.000.000,00	100%	20.010.000,00
		02	26	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Ktr. Camat Marioriawa	-	0,00	25 pasang	10.010.000,00
		02	45	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan bimtek yang diikuti	Ktr. Camat Marioriawa	1 tahun	10.000.000,00	1 tahun	10.000.000,00
		05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	0,00	100%	10.000.000,00
		05	03	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Ktr. Camat Marioriawa	-	0,00	1 tahun	10.000.000,00
		14		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan		100%	21.600.000,00	100%	21.600.000,00
		14	01	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan	Ktr. Camat Marioriawa	1 tahun	21.600.000,00	1 tahun	21.600.000,00
		19		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan		5 jenis	62.000.000,00	5 jenis	62.000.000,00
		14	01	Bupati Menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Ktr. Camat Marioriawa	1 tahun	50.000.000,00	1 tahun	50.000.000,00
			02	Penyuluhan Kantibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Ktr. Camat Marioriawa	1 tahun	12.000.000,00	1 tahun	12.000.000,00
1	19			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina		100%	411.480.000,00	100%	411.480.000,00
1	19	19	01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Ktr. Camat Marioriawa	5 desa	7.500.000,00	5 desa	7.500.000,00
	19	19	02	Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan dan Penghulu Syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan yang diberi insentif	Ktr. Camat Marioriawa	109 orang	207.600.000,00	1 tahun	207.600.000,00

1	19	19	03	Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif	Ktr. Camat Marioriawa	83 orang	119.880.000,00	1 tahun	119.880.000,00
	19	19	04	Fasilitasi kader posyandu	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	Ktr. Camat Marioriawa	85 orang	76.500.000,00	1 tahun	76.500.000,00
Jumlah Belanja Langsung								947.715.200		899.959.800
KELURAHAN BATU-BATU										
		01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	51.025.800,00	100%	53.860.000,00
		01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Batu-Batu	12 bulan	5.280.000,00	12 bulan	6.300.000,00
		01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Batu-Batu	2 unit	500.000,00	2 unit	500.000,00
		01	08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kel. Batu-Batu	11 jenis	1.000.000,00	11 jenis	1.000.000,00
		01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Batu-Batu	6 jenis	495.000,00	6 jenis	495.000,00
		01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Batu-Batu	1 tahun	4.000.000,00	1 tahun	3.000.000,00
		01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Batu-Batu	1 tahun	2.040.000,00	1 tahun	2.040.000,00
		01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Kel. Batu-Batu	1 tahun	19.261.800,00	1 tahun	22.076.000,00
		01	20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket pelayanan perkantoran	Kel. Batu-Batu	5 paket	18.449.000,00	5 paket	18.449.000,00
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	36.754.200,00	100%	37.140.000,00
		02	06	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kel. Batu-Batu	4 jenis	20.000.000,00	4 jenis	20.000.000,00
		02	09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang dipelihara	Kel. Batu-Batu	1 tahun	4.000.000,00	1 tahun	4.000.000,00
		02	10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Batu-Batu	2 unit	11.494.200,00	2 unit	11.880.000,00
		02	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Batu-Batu	1 jenis	1.260.000,00	1 jenis	1.260.000,00

		03	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik	Kel. Batu-Batu	100%	3.220.000,00	100%	7.000.000,00	
		01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		8 psg	3.220.000,00	0,00	0,00	
		05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	
		05	01 Penyusunan profil kelurahan	Jumlah profil yang tersusun	Kel. Batu-Batu	1 dokumen	7.000.000,00	1 dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Belanja Langsung					98.000.000		98.000.000
			KELURAHAN KACA							
		01	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	Kel. Kaca	100%	56.017.500,00	100%	57.320.000,00	
		01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Kaca	12 bulan	1.698.000,00	12 bulan	2.000.000,00	
		01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Kaca	3 unit	600.000,00	3 unit	700.000,00	
		01	08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kel. Kaca	11 jenis	1.729.000,00	11 jenis	2.000.000,00	
		01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Kaca	7 jenis	1.226.000,00	7 jenis	1.500.000,00	
		01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Kaca	1 tahun	4.000.000,00	1 tahun	4.000.000,00	
		01	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Kaca	1 tahun	2.040.000,00	1 tahun	2.040.000,00	
		01	18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi		1 tahun	23.551.000,00	1 tahun	24.000.000,00	
		01	20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket pelayanan perkantoran		5 paket	21.173.500,00	5 paket	21.080.000,00	
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	Kel. Kaca	100%	32.112.500,00	100%	33.680.000,00	
		02	06 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kel. Kaca	3 jenis	7.850.000,00	3 jenis	7.850.000,00	
		02	07 Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	Kel. Kaca	1 jenis	6.300.000,00	1 jenis	6.500.000,00	
		02	09 Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Luas gedung dan halaman kantor yang	Kel. Kaca	35 M2	2.000.000,00	35 M2	2.500.000,00	

		02	10	kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Kaca	4 unit	14.962.500,00	4 unit	15.330.000,00		
		02	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Kaca	1 jenis	1.000.000,00	1 jenis	1.500.000,00		
		03	01	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik		100%	2.870.000,00	100%	0,00		
		03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Kaca	7 psg	2.870.000,00	0,00	0,00		
		05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00		
		05	01	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah profil yang tersusun	Kel. Kaca	1 dokumen	7.000.000,00	1 dokumen	7.000.000,00		
				Jumlah Belanja Langsung					98.000.000		98.000.000	
				KELURAHAN ATTANGSALO								
		01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	49.951.000,00	100%	54.646.000,00		
		01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Attangsalo	12 bulan	1.200.000,00	12 bulan	1.500.000,00		
		01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Attangsalo	2 unit	400.000,00	2 unit	450.000,00		
		01	08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kel. Attangsalo	9 jenis	1.569.000,00	9 jenis	1.600.000,00		
		01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Attangsalo	6 jenis	500.000,00	6 jenis	500.000,00		
		01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Attangsalo	1 tahun	4.000.000,00	1 tahun	3.500.000,00		
		01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Attangsalo	1 tahun	2.040.000,00	1 tahun	2.040.000,00		
		01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Kel. Attangsalo	1 tahun	22.358.500,00	1 tahun	29.172.500,00		
			20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket pelayanan perkantoran		5 paket	17.883.500,00	5 paket	15.883.500,00		

	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	37.829.000,00	100%	36.354.000,00	
	02	06	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kel. Attangsalo	5 jenis	12.850.000,00	5 jenis	12.850.000,00	
	02	07	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	Kel. Attangsalo	4 jenis	7.800.000,00	4 jenis	6.000.000,00	
	02	09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang dipelihara	Kel. Attangsalo	1 tahun	1.000.000,00	1 tahun	1.500.000,00	
	02	10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Attangsalo	2 unit	15.179.000,00	2 unit	15.004.000,00	
	26	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Attangsalo	1 jenis	1.000.000,00	1 jenis	1.000.000,00	
	03		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik		100%	3.220.000,00	100%	0,00	
	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Attangsalo	7 psg	3.220.000,00	0,00	0,00	
	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	
	05	01	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah profil yang tersusun	Kel. Attangsalo	1 dokumen	7.000.000,00	1 dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Belanja Langsung					98.000.000		98.000.000
			KELURAHAN MANORANGSALO							
	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	Kel. Manorangsalo	100%	57.517.800,00	100%	60.860.000,00	
	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Manorangsalo	12 bulan	2.496.000,00	12 bulan	2.500.000,00	
	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Manorangsalo	2 unit	500.000,00	2 unit	500.000,00	
	01	08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kel. Manorangsalo	12 jenis	2.040.000,00	12 jenis	2.040.000,00	
	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Manorangsalo	7 jenis	1.600.000,00	7 jenis	1.600.000,00	

	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Manorangsal	1 tahun	4.000.000,00	1 tahun	4.000.000,00
	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Manorangsal	1 tahun	2.040.000,00	1 tahun	2.040.000,00
	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi		1 tahun	18.011.800,00	1 tahun	21.350.000,00
	01	20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket pelayanan perkantoran	Kel. Manorangsal	5 paket	26.830.000,00	5 paket	26.830.000,00
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	Kel. Manorangsal	100%	29.912.200,00	100%	30.140.000,00
	02	06	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kel. Manorangsal	4 jenis	10.550.000,00	4 jenis	10.550.000,00
	02	09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang dipelihara	Kel. Manorangsal	210 M2	3.000.000,00	210 M2	3.000.000,00
	02	10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Manorangsal	3 unit	15.012.200,00	3 unit	15.240.000,00
	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Manorangsal	2 jenis	1.350.000,00	2 jenis	1.350.000,00
	03		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik		100%	3.570.000,00	100%	0,00
	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Manorangsal	9 psg	3.570.000,00	0,00	0,00
	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00
	05	01	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah profil yang tersusun	Kel. Manorangsal	1 dokumen	7.000.000,00	1 dokumen	7.000.000,00
				Jumlah Belanja Langsung			98.000.000		98.000.000
			KELURAHAN LIMPOMAJANG						
	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	Kel. Limpomajang	100%	57.380.000,00	100%	58.250.000,00

	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Limpomajang	12 bulan	1.200.000,00	12 bulan	1.200.000,00
	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Limpomajang	3 unit	450.000,00	3 unit	450.000,00
	01	08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kel. Limpomajang	8 jenis	1.000.000,00	8 jenis	1.000.000,00
	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Limpomajang	6 jenis	840.000,00	6 jenis	840.000,00
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Limpomajang	1 tahun	4.000.000,00	1 tahun	4.000.000,00
	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Limpomajang	1 tahun	2.040.000,00	1 tahun	2.040.000,00
	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Kel. Limpomajang	1 tahun	25.955.000,00	1 tahun	28.356.000,00
	01	20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket pelayanan perkantoran	Kel. Limpomajang	5 paket	21.895.000,00	5 paket	20.364.000,00
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	Kel. Limpomajang	100%	30.750.000,00	100%	32.750.000,00
	02	07	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	Kel. Limpomajang	3 jenis	13.000.000,00	3 jenis	15.000.000,00
	02	09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang dipelihara	Kel. Limpomajang	20 M2	2.100.000,00	20 M2	2.100.000,00
	02	10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Limpomajang	3 unit	13.950.000,00	3 unit	13.950.000,00
	26	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Limpomajang	3 jenis	1.700.000,00	3 jenis	1.700.000,00
	03		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik		100%	2.870.000,00	100%	0,00
	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Limpomajang	7 psg	2.870.000,00	0,00	0,00
	05		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik		100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00

		05	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Limpomajang	7 psg	7.000.000,00	7 psg	7.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung								98.000.000		98.000.000

